



# Pengaruh Jumlah Penduduk dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pajak Daerah Kota Malang

Fiki Rachman Asy'ari, Nazief Nirwanto, Aris Siswati

Fiki Rachman Asy'ari, Nazief Nirwanto, Aris Siswati; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang; Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang, Jawa Timur; Indonesia.

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 2019-11-12

Received in revised form 2020-01-14

Accepted 2020-02-01

### Kata kunci:

Desentralisasi Fiskal; PAD; Pajak Daerah.

### Keywords:

Fiscal Decentralization; PAD; Regional Tax.

### How to cite item:

Fiki Rachman Asy'ari, Nazief Nirwanto, Aris Siswati. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pajak Daerah Kota Malang. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(1).

## Abstrak

Sejak masa desentralisasi fiskal dan otonomi daerah dimulai pada tahun 2000 setiap daerah di Indonesia dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri melalui penerimaan daerah. Oleh sebab itu untuk, meningkatkan penerimaan daerah dapat diupayakan melalui pajak daerah. Pendapatan yang paling besar dan potensial dari PAD adalah sektor penerimaan pajak daerah. Walaupun secara nominal pajak daerah selalu meningkat namun kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh jumlah penduduk, dana bagi hasil, terhadap pajak daerah kota Malang tahun 2008-2017. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi dan analisis regresi linear berganda. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Malang dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Malang. Data yang digunakan adalah data runtut waktu (time series) selama 10 tahun yaitu tahun 2008-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pajak daerah, sedangkan variabel DBH negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah kota Malang pada tahun 2008-2017.

## Abstract

Since the time of fiscal decentralization and regional autonomy began in 2000, every region in Indonesia is required to be able to meet its own needs through regional revenues. Therefore, to increase regional revenues can be sought through regional taxes. The biggest and most potential income from PAD is the local tax revenue sector. Even though nominally local taxes always increase, the contribution of local taxes to PAD is still small. This study aims to identify the effect of population numbers, profit sharing funds, on Malang city regional taxes in 2008-2017. The method of analysis in this study uses the method of description and multiple linear regression analysis. The type of data used in this study is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Malang City and the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Malang City. The data used is time series data for 10 years, namely in 2008-2017. The results of the study show that the population variable has a significant positive effect on local taxes, while the DBH variable is negative and does not significantly influence Malang's regional taxes in 2008-2017.

## 1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menguatkan peranan otonomi daerah dalam mengembangkan dan membangun daerah secara berkelanjutan. Undang-undang tersebut memberikan hak otonom kepada daerah secara penuh untuk mengatur dan mengurus keperluan daerahnya sendiri sesuai dengan kebijakan dan aspirasi masyarakat. Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas kepada daerah maka sumber-sumber

\* Fiki Rachman Asy'ari, Nazief Nirwanto, Aris Siswati.

© 2020 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

keuangan telah banyak yang bergeser ke daerah. Menurut Haryanto, 2006 bahwa desentralisasi fiscal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dalam wadah Pendapatan Asli Daerah dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, diharapkan dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam membangun daerahnya, salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan sumber penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah. Definisi pajak menurut Abut dalam Kumalawati (2015) bahwa Pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sejalan dengan pengertian tersebut, UU NO. 28 Tahun 2009 tentang PDRB, sebagai pengganti dari UU NO. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 juga lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah). Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sehingga kemakmuran rakyat dapat tercapai.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap, baik yang produktif atau tidak produktif, Anata dalam Kumalawati, (2015). Jumlah penduduk menunjukkan tinggi rendahnya pertumbuhan penduduk dalam suatu daerah. Penambahan jumlah penduduk yang tinggi disertai dengan perubahan teknologi akan mendorong naiknya tabungan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Ketika pendapatan daerah meningkat maka akan berpengaruh dengan pembayaran pajak yang akan bertambah pula.

---

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan jumlah penduduk, dana bagi hasil, dan pajak daerah di kota Malang tahun 2008-2017.
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, dana bagi hasil, dan pajak daerah di kota Malang tahun 2008-2017.
3. Untuk menganalisis faktor yang berpengaruh dominan antara jumlah penduduk dan dana bagi hasil terhadap pajak daerah di kota Malang tahun 2008-2017.

---

## **3. Teori/Kerangka Pemikiran**

### **A. Pajak Daerah**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009). Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, disamping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi pengaturan.

Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, dan pajak Rokok. Pajak Kabupaten/ Kota ada beberapa jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

### **B. Jumlah Penduduk**

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa bagian di dunia ini menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat. Di beberapa

bagian di dunia ini telah terjadi kemiskinan dan kekurangan pangan. Fenomena ini menggelisahkan para ahli, dan masing - masing dari mereka berusaha mencari faktor - faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut.

Menurut Thomas Robert Malthus, seorang pendeta Inggris, hidup pada tahun 1766 hingga tahun 1834, menyatakan bahwa penduduk seperti juga tumbuhan dan binatang. Apabila tidak ada pembatasan, akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi ini. Tingginya pertumbuhan penduduk ini disebabkan karena hubungan kelamin antar laki - laki dan perempuan tidak bisa dihentikan. Disamping itu Malthus berpendapat bahwa untuk hidup manusia memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan jauh lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Apabila tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan mengalami kekurangan bahan makanan. Inilah sumber dari kemelaratan dan kemiskinan manusia, untuk dapat keluar dari permasalahan kekurangan pangan tersebut, pertumbuhan penduduk harus dibatasi.

Paul Ehrlich dalam bukunya "The Population Bomb" pada tahun 1971, menggambarkan penduduk dan lingkungan yang ada di dunia dewasa ini sebagai berikut. Pertama, dunia ini sudah terlalu banyak manusia; kedua, keadaan bahan makanan sangat terbatas; ketiga, karena terlalu banyak manusia di dunia ini lingkungan sudah banyak yang tercemar dan rusak.

Marx dan Engels tidak sependapat dengan Malthus yang menyatakan bahwa apabila tidak diadakan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan kekurangan bahan pangan. Menurut Marx tekanan penduduk yang terdapat di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan penduduk terhadap kesempatan kerja. Kemelaratan terjadi bukan disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, tetapi kesalahan masyarakat itu sendiri seperti yang terdapat pada negara - negara kapitalis. Kaum kapitalis akan mengambil sebagian pendapatan dari buruh sehingga menyebabkan kemelaratan buruh tersebut.

John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan

penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun demikian John Stuart Mill berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Selanjutnya apabila produktifitas seseorang tinggi maka cenderung ingin mempunyai keluarga yang kecil. Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah. Tidaklah benar bahwa kemiskinan tidak dapat dihindarkan atau kemiskinan itu disebabkan karena sistem kapitalis. Kalau pada suatu waktu di suatu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan ini hanya bersifat sementara saja. Pemecahannya ada dua kemungkinan yaitu: mengimport bahan makanan, atau memindahkan sebagian penduduk wilayah tersebut ke wilayah lain.

### **C. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pajak Daerah**

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar yang bisa berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pertumbuhan penduduk harus ditingkatkan dengan baik. Jumlah Penduduk berpengaruh secara negatif terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung, dimana tingkat signifikan sebesar 0.172 dan koefisien sebesar 7,061 (Maivira, 2016). Pengaruh yang tidak signifikan kemungkinan dipengaruhi masih adanya penduduk yang tidak terdaftar sebagai subjek pajak daerah.

### **D. Dana Bagi Hasil**

Dana bagi hasil, menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berjalannya sistem transfer dalam dana bagi hasil mencerminkan adanya otonomi yang seluas-luasnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. tujuan utama dari dana bagi hasil adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Depkeu, 2008).

### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian yang pertama oleh Maivira (2016), tentang pengaruh PDRB dan jumlah penduduk terhadap pajak daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB, jumlah penduduk, dan pajak daerah. Dari hasil analisis data ditemukan PDRB berpengaruh secara positif terhadap pajak daerah di kabupaten Sijunjung, dimana tingkat signifikan sebesar 0.029 dan koefisien sebesar 1,524. Artinya peningkatan satu persen PDRB akan meningkatkan pajak daerah di kabupaten Sijunjung sebesar 1,524%.

Penelitian oleh Januarti dan Mangiring (2017) yaitu tentang pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah di Pematangsiantar. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan pajak daerah selama 4 tahun yaitu tahun 2013 sampai tahun 2016 di SAMSAT Pematangsiantar. Berdasarkan hasil analisis maka penulis mengatakan bahwa secara parsial pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak daerah kabupaten Simalungun dan kota Pematangsiantar dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 99% sedangkan sisanya 1% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti. Dengan demikian semakin baik penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka pendapatan pajak daerah kabupaten Simalungun dan kota Pematangsiantar akan meningkat.

Penelitian oleh Lady (2017) tentang pengaruh PBB dan BPHTB terhadap pajak daerah kabupaten Klaten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PBB dan BPHTB terhadap pajak daerah. Berdasarkan hasil analisis olah data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah PBB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah kabupaten Klaten, sedangkan BPHTB tidak berpengaruh terhadap pajak daerah kabupaten Klaten. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel PBB dan variabel BPHTB secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak daerah kabupaten Klaten.

Penelitian oleh Awaliyah (2015) yaitu tentang pengaruh pendapatan pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten Tegal. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh pendapatan pajak reklame dan pajak

penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil penelitian pendapatan pajak reklame terhadap pajak daerah tidak signifikan, artinya besar kecilnya nilai pendapatan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya nilai penerimaan pajak daerah. Sedangkan pendapatan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah signifikan, artinya besar kecilnya nilai pendapatan pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap besar kecilnya nilai penerimaan pajak daerah, hal ini dikarenakan pendapatan pajak penerangan jalan pada tahun 2011-2014 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terjadi kenaikan pendapatan pajak penerangan jalan disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian di kabupaten Tegal terutama pada aktifitas perekonomian di malam hari yang membutuhkan penerangan jalan yang mendorong para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya pada malam hari sehingga tidak akan terganggu masalah penerangan.

---

#### **4. Metode Penelitian**

##### **A. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pajak daerah kota Malang tahun 2008-2017.
2. Jumlah penduduk berpengaruh dominan terhadap pajak daerah kota Malang tahun 2008-2017.

##### **B. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang, dengan menekankan kepada Peranan DBH dan Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah di Kota Malang pada tahun 2008-2017.

##### **C. Bahan/cara Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dari secara berkala (time series) periode 2008 - 2017. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari BPS (Badan Pusat

Statistik) dan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kota Malang yaitu data realisasi Pajak Daerah, data DBH, dan data jumlah penduduk Kota Malang tahun 2008 - 2017.

#### D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda dan metode analisis statistik dengan menggunakan SPSS versi 24.00.

### 5. Pembahasan

#### A. Hasil Uji Normalitas

Tabel 1. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Berdasarkan pada tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa hasil uji normalitas antara DBH dan Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah menggunakan uji Kolmogorov-Smirnof diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,200 > 0,05$ . Hal tersebut berarti data residual terdistribusi normal.

#### B. Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients		Colinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	DBH	0,781	1,281
	Jumlah Penduduk	0,781	1,281

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa uji multikolinearitas dengan melihat nilai VIF dan nilai tolerance dari masing-masing variabel bebas yaitu DBH dan jumlah penduduk, tidak terdapat multikolinearitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai VIF dari variabel DBH dan jumlah



penduduk sebesar  $1,281 \leq 10$  serta nilai tolerance sebesar  $0,781 \geq 0,1$ .

### C. Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson didapatkan nilai DW sebesar 0,805, berdasarkan ketentuan nilai DW terletak  $< 1,10$  sehingga terdapat autokorelasi.

### D. Uji Heterokedastisitas

Pada grafik scatterplot, bahwa tidak terdapat pola tertentu dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel pada penelitian ini tidak terdapat heterokedastisitas.

### E. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Hasil Anaisis Regresi Linear Berganda

Variabel Bebas	Koefisisen Regresi	T hitung	Sig T
DBH (X1)	-0,111	-0,719	0,495
Jumlah Penduduk (X2)	0,979	6,315	0,000
Konstanta	-345085922000.000		
R	0,932		
Adjusted R <sup>2</sup>	0,869		
F	23,142		
Sig. F	0,001		

Hasil analisis tabel 4, maka persamaan regresi linear berganda dapat diketahui sebagai berikut:

$$Y = -345085922000.000 + 0,979X_2$$

Berdasarkan hasil persamaan tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -345085922000.000 artinya besarnya pajak daerah tanpa dipengaruhi oleh DBH dan jumlah penduduk adalah sebesar Rp -345,085,922,000.
2. Koefisien regresi jumlah penduduk sebesar 0,979 menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh yang searah dengan pajak daerah, artinya semakin tinggi jumlah penduduk

maka pajak daerah juga naik begitu pula sebaliknya. Jika jumlah penduduk bertambah 1 jiwa maka pajak daerah akan naik sebesar Rp 0,979.

3. Angka adjusted R square ( $R^2$ ) adalah 0,869 berarti 86,9% pajak daerah kota Malang dipengaruhi oleh DBH dan jumlah penduduk sedangkan sisanya 13,1% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

#### F. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan melalui analisis varian (Uji F) pada taraf  $\alpha = 0,05$  (5%). Dari perhitungan diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar -0,663 yang lebih kecil dari  $F_{tabel}$  sebesar 23,142 sedangkan nilai signifikan sebesar 0.001 lebih kecil dari  $\alpha = 0.05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel bebas yaitu DBH dan jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu pajak daerah.

#### G. Uji t (t-test)

Dari hasil perhitungan program SPSS yang ditunjukkan pada tabel 12 diatas maka pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh DBH terhadap pajak daerah kota Malang berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai  $t_{hitung} = -0,719$  ternyata lebih besar dari  $t_{tabel} = -6,267$  dan nilai signifikansi = 0,495 yang lebih besar dari 0,05, hal ini berarti bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah kota Malang.
- b. Pengaruh jumlah penduduk terhadap pajak daerah kota Malang, berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai  $t_{hitung} = 6,315$  ternyata lebih besar dari  $t_{tabel} = -6,267$ , sedangkan tingkat signifikansi = 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pajak Daerah kota Malang.
- c. Pengujian pengaruh variabel bebas secara parsial menggunakan uji t dengan cara membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada taraf  $\alpha=5\%$ .

## H. Diskusi

Hasil persamaan regresi linear berganda ini menunjukkan bahwa koefisien regresi satu variabel bebas yaitu DBH ( $X_1$ ) memiliki nilai yang negatif. Dapat diartikan bahwa variabel bebas tersebut memiliki hubungan yang negatif. Dimana jika variabel bebas tersebut dalam hal ini DBH mengalami kenaikan maka variabel terikat dalam hal ini adalah pajak daerah akan mengalami penurunan atau dapat dikatakan berbanding terbalik. Hasil perhitungan regresi diketahui DBH tidak berpengaruh signifikan karena tidak berpengaruh secara langsung, hal ini dikarenakan sumber penerimaan DBH kota Malang berasal dari dana bagi hasil bukan pajak. Sebagian besar DBH bukan pajak tersebut bersumber dari cukai yang didukung oleh 56 pabrik rokok dan dengan produksi per tahun sejumlah 30.030 juta batang. Dana bagi hasil dalam penelitian ini merupakan dana untuk desentralisasi dan pembangunan daerah, sehingga variabel dana bagi hasil merupakan variabel yang sama fungsinya dengan pajak daerah.

Variabel bebas lainnya yaitu jumlah penduduk ( $X_2$ ) memiliki nilai yang positif, yang berarti bahwa variabel bebas tersebut memiliki hubungan yang positif atau searah. Dimana jika variabel bebas dalam hal ini adalah jumlah penduduk mengalami kenaikan, maka variabel terikat dalam hal ini pajak daerah juga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya jika jumlah penduduk turun maka akan menurunkan pajak daerah. Jika jumlah penduduk meningkat maka pemasukan pajak dari setiap pos sektor pajak akan bertambah yang akan menyebabkan bertambahnya pajak daerah di kota Malang. Bertambahnya pajak daerah tersebut akan berpengaruh pula dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linear berganda tersebut bahwa  $H_a$  diterima sedangkan  $H_o$  ditolak maka dapat diketahui DBH dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah kota Malang.

---

## 6. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa Pajak daerah kota Malang dari tahun 2008 sampai 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya begitu juga dengan jumlah penduduk yang

ada di kota Malang selalu meningkat, hingga pada tahun 2017 mencapai 903,205 ribu jiwa. Hasil analisis regresi linear berganda dapat diketahui bahwa DBH dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak daerah kota Malang pada tahun 2008 - 2017. Artinya, pajak daerah di kota Malang tidak dipengaruhi oleh DBH dan jumlah penduduk. Jumlah penduduk berpengaruh secara dominan terhadap pajak daerah di kota Malang pada tahun 2008-2017. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang terus meningkat di kota Malang akan semakin banyak yang membayar pajak dan menyebabkan penerimaan pajak ikut meningkat.

---

### Daftar pustaka

- Awaliyah, Fadilatun. 2015. *"Pengaruh Pendapatan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Tegal) Periode 2011-2014"*. Jurnal. Universitas Dian Nuswantoro.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Luas Wilayah Kota Malang Menurut Kecamatan. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). (diakses pada 10-November-2018 21:24 WIB).
- Badan Pusat Statistik. 2016. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). (diakses pada 10-November-2018 21:41 WIB).
- Badan Pelayanan Keuangan dan Aset Daerah. 2017. Realisasi APBD. [www.bpkad.malangkota.go.id](http://www.bpkad.malangkota.go.id). (diakses pada 11-November-2018 19.05 WIB)
- Bagus DP, Ida, Dwirandra. 2015. *"Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali"*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Haryanto, JT dan Astuti E. 2006. Kemandirian Daerah: Sebuah Perspektif dengan Metode Path Analysis. *Jurnal Manajemen Usahawan*. Nomor 03. Jakarta: Lembaga Management FE UI.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariance dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar, 2003, *Basic Econometrics*, McGraw Hill, New York.
- Hamonang S, Timbul. 2009. *"Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) dan Bagi HASIL Pajak dalam Perekonomian Jawa Timur"*. JESP VOL.1,No.2. Jakarta.
- Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Januarti P, Nora. Mangiring PS, Hengki. 2017. *"Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah"*. Jurnal EK & BI. Politeknik Bisnis Indonesia.
- Kumalawati, Esi. 2015. *"Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Periode 2000-2014"*. Jurnal. Universitas Mumadaiyah Yogyakarta
- Lady S, Syska. 2017. *"Pengaruh PBB dan BPHTB Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Klaten"*. JRAK, Vol. 13, No. 2. Universitas Widya Dharma Klaten.
- Maivira, Enjelia. 2016. *"Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung"*. Jurnal Ekonomi. Universitas Andalas.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi 2016*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Mulyati Y, Sri. 2017. *"Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah pada Provinsi Aceh"*. Jurnal Ekonomi. Universitas Malikusaleh.
- Rusli, Said. 2012. *"Pengantar Ilmu Kependudukan"*. Pustaka LP3ES. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Edisi Ketiga. Cetakan ke-20. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Widyasari, Nurul. 2013. *"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)"*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
-